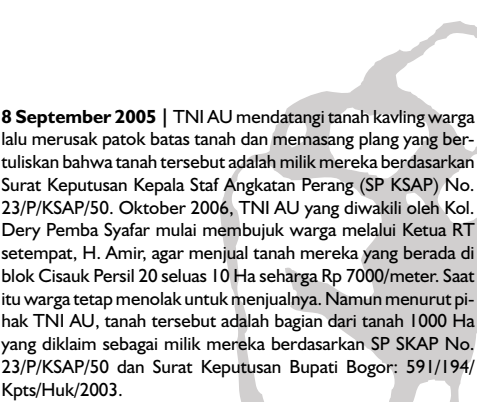


IMF adalah mengurus krisis hutang internasional yang mulai bermunculan di berbagai negara peminjam. Sebagaimana hutang di negara-negara Dunia Ketiga membengkak dan tampak-nya akan tak terbayar, sesuatu yang akan membuat sistem eko-nomi internasional tersebut kembali kolaps, baik IMF maupun Bank Dunia mulai menawarkan pinjaman baru dengan syarat negara-negara penghutang tersebut setuju dengan program-program struk-tural di bawah koordinasi korporasi-korporasi internasional yang mereka dukung. Program yang ditawarkan itu pada intinya untuk “mempermurah ongkos produksi bagi korporasi-korporasi internasional” tersebut (David Ranney, *The Evolving Supra-National Policy Arena*, University of Illinois Chicago 1993, hlm 24) dengan cara:

- Mereduksi pengeluaran pemerintah, untuk mengontrol inflasi dan mereduksi tuntutan aliran kapital dari luar, se-buah langkah yang dalam prakteknya diterjemahkan ke dalam pemotongan pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan;
- Pemotongan upah atau menekan kenaikannya dengan ke-ras demi mereduksi inflasi dan membuat ekspor lebih kompetitif;
- Liberalisasi impor untuk membuat industri lokal lebih efi-sien dan memberlakukan insentif bagi produksi yang ber-wawasan pasar ekspor, yang dapat dilihat baik sebagai sebuah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh pasar luar negeri dan juga sebuah sumber daya pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis daripada sekedar pasar lokal;
- Menghilangkan batasan-batasan investasi luar negeri da-lam bidang industri dan layanan finansial untuk membuat produksi lokal dan layanan pengantarannya lebih efisien, atas kehadiran kompetitor dari luar negeri;
- Menurunkan nilai suku bunga lokal yang berbanding de-ngan dolar demi membuat ekspor lebih kompetitif; dan
- Memprivatisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan memulai penghapusan aturan-aturan secara radikal demi mempromosikan alokasi sumber-sumber daya sesuai atur-an pasar bukan lagi oleh aturan pemerintah. (Walden

reportase kronologis KASUS TANAH RUMPIN, BOGOR



8 September 2005 | TNI AU mendarangi tanah kavling warga lalu merusak patok batas tanah dan memasang plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (SP KSAP) No. 23/P/KSAP/50. Oktober 2006, TNI AU yang diwakili oleh Kol. Dery Pemba Syafar mulai membujuk warga melalui Ketua RT setempat, H. Amir, agar menjual tanah mereka yang berada di blok Cisauk Persil 20 seluas 10 Ha seharga Rp 7000/meter. Saat itu warga tetap menolak untuk menjualnya. Namun menurut pi-hak TNI AU, tanah tersebut adalah bagian dari tanah 1000 Ha yang diklaim sebagai milik mereka berdasarkan SP SKAP No. 23/P/KSAP/50 dan Surat Keputusan Bupati Bogor: 591/194/Kpts/Huk/2003.

8 November 2006 | TNI AU dilengkapi senjata laras panjang mulai menduduki lokasi persawahan milik warga. Dengan membawa Beko dan alat berat lainnya, mereka mulai menggali lahan persawahan yang terbelang masih sangat produktif terse-but. Aksi tersebut memancing reaksi warga.

9 November 2006 | Sekitar 250 warga melakukan demons-trasi di lokasi penggalian. Aksi warga disaksikan oleh Kepala De-sa, Ketua BPD, Camat, Koramil dan Kapolsek. Dalam aksinya, warga meminta TNI AU untuk segera meninggalkan lokasi ter-sebut. Tetapi demontrasi warga tidak berlangsung lama karena helikopter milik TNI AU yang sengaja terbang rendah memaksa mereka untuk bubar.

10 Desember 2006 | Lima hari setelah melakukan unjuk rasa ke DPRD Bogor, warga kembali melakukan aksi demonstrasi di jalan raya Cisauk-Cicangkal. Setelah itu mereka mendarangi lo-kasi persawahan yang digali TNI AU. Areal yang digali tersebut luasnya mencapai 2 Ha dengan kedalaman 2 meter. Keesokan harinya pada tanggal 11, diadakan pertemuan antara warga desa Sukamulya dengan Komisi A DPRD Kab. Bogor. Warga meminta TNI AU untuk segera menghentikan penggalan areal persa-wahan milik warga, namun pihak TNI AU bersikeras akan terus melakukan penggalian sampai ada perintah untuk menghenti-kan penggalian tersebut dari Komandan Pusat (Dephan dan KASAU). Semenjak itu sering terjadi intimidasi yang dilakukan oleh TNI AU dan penjagaan yang ketat lengkap dengan senjata laras panjang di sekitar lokasi.

Bello, *Dark Victory*, Oakland, Calif. Food First 1994, hlm 27)

Kebanyakan pemerintah negara-negara Dunia Ketiga tak mempunyai pilihan lain kecuali menerima setiap syarat yang di-ajukan demi mendapatkan kucuran hutang baru, termasuk In-donesia, di mana pada bulan Januari 1998 Suharto menanda-tangani perjanjian dengan IMF. Siapapun yang duduk dalam jaja-ran pemerintahan—entah ia dipilih secara demokratis atau ti-dak—selama negara masih terjerat dalam lilitan hutang, maka ia harus mengikuti aturan dan perjanjian ekonomi yang telah di-sepakati sebelumnya.

Pemerintahan Global Baru—Trinitas Suci Baru

Globalisasi telah sejak awal membawa kontradiksi-kon-tradiksinya sendiri yang ditandai oleh konsep negara-bangsa yang dicetuskan oleh Ernest Renan tahun 1890-an. Bahkan ne-gara kesejahteraan nasional yang demokratis dan teratur pun tak pernah menyentuh realitas bahwa ada saling keterkaitan an-tar setiap negara, yang artinya tak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri tanpa jalinan ekonomi dengan negara lainnya. Teori-teori nasionalis juga tidak menyentuh realita bahwa dunia tidaklah merupakan sekedar sekumpulan orang-orang yang hi-dup terpisah dengan orang lainnya, dan bahwa sesungguhnya yang ada sejak awal adalah negara yang kuat mendominasi yang lemah—setiap negara terlalu bergantung pada negara lain, ter-masuk negara-negara adidaya, untuk dapat benar-benar me-nentukan apa yang harus berlaku di daerahnya masing-masing. Pasar dan bisnis beroperasi secara inter-nasional dan tidak se-lalu sejalan dengan kepentingan “negara mereka” beserta selu-ruh rakyatnya.

Pemerintahan-pemerintahan nasional telah memberikan kekuatannya pada “Trinitas Suci Baru”—IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO. Agensi-agensi ini semakin menentukan semua aturan yang harus diberlakukan dalam setiap negara, tentang bagaimana mereka akan beroperasi dan berkooperasi demi tu-juan yang satu: Agenda Korporasi.

Tapi justru tidak melenyapkan pemerintah-pemerintah nasional, sistem ekonomi global baru ini membutuhkan peme-

Tanah Rumpin adalah lahan pertanian yang produktif. Tanah yang telah dikelola oleh warga Suka-mulya secara turun-temurun ini memiliki sejarah kepemilikan yang panjang semenjak penjajahan Belanda hingga Jepang. Semenjak tahun 1955–1956 tanah ini diklaim sebagai milik TNI AU. Pada tahun 1976, BPN Bogor memberikan status Girik pada tanah tersebut, namun warga belum mampu merubahnya menjadi Surat Hak Milik (Sertifikat). Pada tahun 1991 TNI AU membuat pernyataan bahwa mereka adalah pemilik tanah seluas 1000 Ha tersebut. Sampai pada akhirnya tahun 2006 aksi pengklaiman kembali dilancarkan oleh pihak TNI AU.



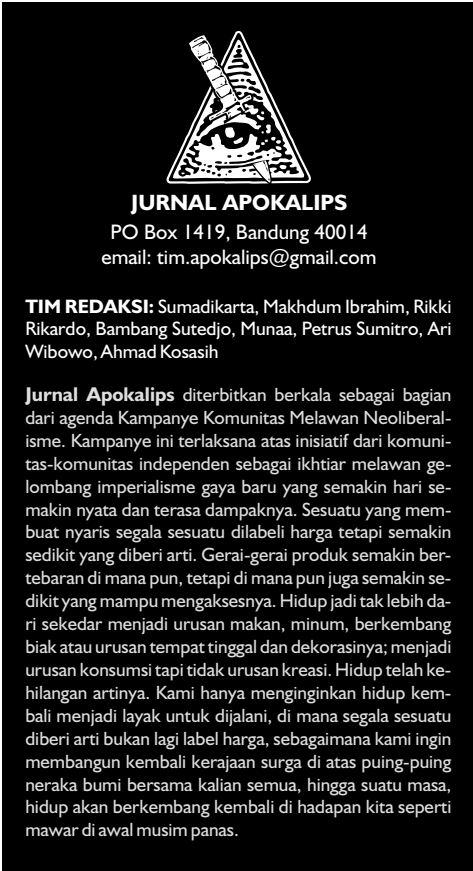
rintah nasional atau/dan bahkan juga lokal untuk menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi nasional/lokal ma-sing-masing demi meningkatkan efektifitas kerja sistem ekono-mi global itu sendiri.

Sebagaimana negara-negara di era pra-modern Eropa yang menandai semakin berkuasanya kelas kapitalis nasional, sistem ekonomi global ini melayani sekaligus didukung oleh se-makin maraknya korporasi-korporasi multinasional/ transna-sional (MNC/TNC). Sebagaimana juga kekuasaan monarki, Tri-nitas Suci Baru tersebut juga paham bahwa mereka hanya akan dapat terus berkuasa apabila membangun aliansi dengan kelas penguasa di setiap inchi daerah di mana mereka beroperasi. Te-tapi fungsi mereka justru lebih sedikit dibandingkan dengan fungsi pemerintahan konvensional—berhubung peran mereka yang nyaris tak nampak—yaitu hanya berfungsi dan tunduk pa-da Agenda Korporasi. Apabila dahulu raja adalah pengejawan-tahan Tuhan di atas bumi, maka kini tuhan-nya adalah Agenda Korporasi itu sendiri. Suka atau tidak, diakui atau tidak, hidup kita dan hidup anak-anak kita kini ada di bawah keku-saannya.



Tanah Rumpin adalah lahan pertanian yang produktif. Tanah yang telah dikelola oleh warga Suka-mulya secara turun-temurun ini memiliki sejarah kepemilikan yang panjang semenjak penjajahan Belanda hingga Jepang. Semenjak tahun 1955–1956 tanah ini diklaim sebagai milik TNI AU. Pada tahun 1976, BPN Bogor memberikan status Girik pada tanah tersebut, namun warga belum mampu merubahnya menjadi Surat Hak Milik (Sertifikat). Pada tahun 1991 TNI AU membuat pernyataan bahwa mereka adalah pemilik tanah seluas 1000 Ha tersebut. Sampai pada akhirnya tahun 2006 aksi pengklaiman kembali dilancarkan oleh pihak TNI AU.

bagai provokator. Beberapa orang yang diculik, diinterogasi, dan disiksa kemudian diserahkan ke Polsek Rumpin tanpa tuduhan yang jelas.



JURNAL APOKALIPS

PO Box 1419, Bandung 40014

email: tim.apokalips@gmail.com

TIM REDAKSI: Sumadikarta, Makhдум Ibrahim, Rikki Rikardo, Bambang Sutedjo, Munaa, Petrus Sumitro, Ari Wibowo, Ahmad Kosasih

Jurnal Apokalips diterbitkan berkala sebagai bagian dari agenda Kampanye Komunitas Melawan Neoliberal-isme. Kampanye ini terlaksana atas inisiatif dari komuni-tas-komunitas independen sebagai ikhtiar melawan ge-lombang imperialisme gaya baru yang semakin hari se-makin nyata dan terasa dampaknya. Sesuatu yang mem-buat nyaris segala sesuatu dilabeli harga tetapi semakin sedikit yang diberi arti. Gerai-gerai produk semakin ber-tebatahan di mana pun, tetapi di mana pun juga semakin se-dikit yang mampu mengaksesnya. Hidup jadi tak lebih da-ri sekedar menjadi urusan makan, minum, berkemban-g biak atau urusan tempat tinggal dan dekorasinya; menjadi urusan konsumsi tapi tidak urusan kreasi. Hidup telah ke-hilangan artinya. Kami hanya menginginkan hidup kem-bali menjadi layak untuk dijalani, di mana segala sesuatu diberi arti bukan lagi label harga, sebagaimana kami ingin membangun kembali kerajaan surga di atas puing-puing neraka bumi bersama kalian semua, hingga suatu masa, hidup akan berkembang kembali di hadapan kita seperti mawar di awal musim panas.



NEWSLETTER PERIODIKAL 2 BULANAN | NOMOR 05 - MARET 2007

JURNAL APOKALIPS

Dalam dunia saat ini, mata kita hanya mengenali apapun sebagai produk dan melihat harga yang tertera di atasnya.

EDITORIAL

Indonesia dilanda krisis finansial dahsyat yang berlanjut hingga kini semenjak tahun 1997—yang sesungguhnya adalah akibat merosotnya nilai rupiah yang disebabkan karena para pe-ngusaha bank swasta Indonesia tak mampu mengembalikan hutang-hutang mereka yang pada tahun ter-sebut telah jatuh tempo—membuat Suharto pada bulan Januari 1998 menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) dengan Managing Director IMF, Michael Camdessus. Dan sejak itu jugalah, maka Indonesia mulai mengoperasikan apapun yang dikatakan IMF atas nama restrukturisasi Indonesia (i.e. pemotongan subsi-di publik, pembukaan keran impor, privatisasi, dll.). Tapi toh ketergantungan pada konsep ekonomi tipe ini bukanlah pertama kalinya, dan apa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah konsekuensi logis dari apa yang terjadi sebelumnya. Pra-IMF, pemerintah Indonesia bukanlah Suharto, melainkan korporasi bankir Warburg & Co., Lehman Brothers dan Lazard Freres—tiga serangkai yang mempraksai pembentukan IGGI (InterGovernmental Group on Indonesia) atau grup intra-pemerintah yang tentunya memerintah Indonesia. Suharto hanyalah alat. Dan ia dibuang saat gaya-gaya bermainnya dianggap kuno dan tak efek-tif lagi. Pasca lengsernya sang diktator, kursi pemerintahan silih berganti diisi oleh berbagai kandidat dari berbagai partai politik yang menawarkan berbagai gaya main baru, tapi toh semuanya hanyalah alat di te-ngah lapangan permainan yang sama. Konsep ekonomi, cengkeraman hutang, semuanya tetap meng-arah pada satu hal yang sama; dari COMECON di era Sukarno, hingga IGGI di era Suharto, hingga kini pasca-IMF dan terlibatnya ADB yang entah sampai kapan, dan kesemuanya menegaskan hal yang sama, bahwa semua pemerintah hanyalah alat yang mengabdikan pada satu tuhan: Agenda Korporasi.

Ilusi Pelunasan Hutang IMF

Kunjungan Managing Director IMF

Secara formal Indonesia telah lepas dari hutangnya terha-dap IMF, namun bukan berarti Indonesia tidak lagi berhubungan dengan agenda pembangunan yang dicetuskan IMF 24 Januari 2007, Managing Director IMF, Rodrigo de Rato datang ke Jakar-ta. Kedatangan Rato ini adalah kedatangan pertama kalinya peja-bat teras IMF ke Jakarta sejak pelunasan hutang Indonesia sebe-sar US\$ 7,5 Miliar pada Oktober 2006. Kedatangan Rato disam-but berbagai spekulasi tentang maksud kunjungannya kali ini, terutama agenda apa yang hendak bicarakanhya bersama SBY. Selama keberadaannya di Indonesia, beberapa LSM berunjuk rasa di depan gedung perwakilan IMF di kompleks gedung Bank Indonesia, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa membawa poster-poster yang bertuliskan "*Build a new world without IMF*", "*Lawan penjajahan gaya baru: neoliberalisme*", "*IMF OUT*", dan poster lain yang intinya menolak upaya intervensi IMF atas Indonesia. Unjuk rasa ini berkaitan dengan prediksi adanya agenda tersembunyi yang dibawa Rato ke Jakarta. Ber-bagai pihak menyatakan kekhawatirannya jika Indonesia kem-bali melakukan pinjaman kepada IMF.

Terkait kedatangan Rato ke Jakarta, beberapa pejabat di pemerintahan termasuk SBY memberikan pernyataannya. "Kunjungan Managing Director IMF Rodrigo de Rato ke Indo-nesia, janganlah diartikan bahwa IMF akan menawarkan kembali bantuan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kita tidak ber-pikir atau merencanakan untuk berutang lagi pada IMF," kata SBY kepada wartawan se usai menerima Rato. Sedangkan Men-ko Perekonomian Boediono menyatakan bahwa Pemerintah In-donesia dalam waktu dekat tidak akan mengajukan proposal pinjaman hutang lagi kepada IMF. "Tidak ada rencana atau ke-perluan untuk itu, kita baru saja membayar kembali. Di sini pun tidak dibahas, dan tidak ada dalam rencana pemerintah untuk itu. Ini adalah kunjungan kehormatan yang tidak ada agenda

khusus. Intinya adalah bertemu untuk bertukar pikiran dan ber-tukar informasi menyangkut beberapa hal," kata Boediono. Se-cara keseluruhan pejabat pemerintah dalam pernyataannya me-negaskan bahwa kunjungan Rato sama sekali tidak membawa agenda pemberian hutang baru. Walaupun begitu, tetap ada agenda yang berkaitan dengan pemberlakuan liberalisasi eko-nomi di Indonesia. Untuk hal ini, IMF masih mempunyai tang-gung jawab menuntaskan tujuan finalnya melakukan liberalisasi ekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Apalagi Boedio-no sendiri pernah memberikan pernyataan bahwa pemerintah masih akan mendengar saran dan menerima bantuan teknis terkait kebijakan perekonomian dari IMF.

Selain pujian-pujian yang diutarakan Rodrigo de Rato ke-pada pemerintah atas keberhasilan menjalankan program IMF di Indonesia, dalam pertemuan itu pula dibicarakan beberapa hal terkait situasi Indonesia lainnya. Salah satunya ialah pro-gram yang dijalankan program IMF di Indonesia sejak tahun 2003 sampai sekarang. Seperti yang diterangkan oleh SBY kepada Rato, yaitu masalah *triple track strategy*, atau strategi tiga jalur yakni stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan pengurangan ke-miskinan juga peningkatan lapangan kerja. Serta masalah me-negenai peran dari UKM dan pertanian yang sangat penting di da-lam strategi pembangunan Indonesia.

Berkaitan dengan program kemiskinan, nampaknya pe-merintah Indonesia belum mampu menjalankan program pe-ngurangan kemiskinan secara signifikan. Karena data BPS (Ba-dan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada 2004 persentase kemiskinan di Indonesia sekitar 16,7% atau sekitar 36 juta jiwa dengan rata-rata pendapatan perbulan sekitar Rp.122.775. Wa-laupun tahun 2000 persentase kemiskinan di Indonesia meni-apai 20.0 sehingga tahun 2004 menunjukkan penurunan, na-mun tahun 2006 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 0,6%. Indikasi naiknya kemiskinan bisa terlihat sekarang ini

terutama jika dikaitkan dengan menurunnya daya beli masya-rakat. Meningkatnya urbanisasi ikut memberi andil pada naik-nya angka kemiskinan. Pemerataan pembangunan dalam kenya-taannya tidak berlaku demikian, karena dalam era otonomi ini perputaran uang di Indonesia sekitar 60% masih berada di pu-lau Jawa, sedangkan daerah masih tetap tertinggal.

Kemudian yang mesti diperhatikan pada pertemuan itu ialah bicarakanhya masalah energi di Indonesia. Dalam per-nyataannya Boediono menerangkan bahwa yang dibahas ialah kebijakan pengelolaan energi Indonesia berkaitan program di-versifikasi energi yang sedang dijalankan. Lalu pembahasan kon-disi pengelolaan energi Indonesia serta hubungannya dengan kondisi energi dunia pada umumnya. Hal ini tentu saja sangat penting untuk dibicarakan terutama erat kaitannya dengan Indonesia yang didorong untuk menjadi negara pengekspor mi-nyak terbesar dan pengintegrasian sistem pengelolaan energi pada sistem global. Perlu diketahui bahwa kuota ekspor energi minyak dan gas Indonesia tahun 2006 paling besar jumlahnya selama kurun waktu 60 tahun, atau sejak negara ini merdeka. Naiknya kuota ekspor ini malah berimbas pada naiknya harga BBM di dalam negeri.

Masalah global ikut dibahas dalam pertemuan itu, yakni menyangkut masalah perkembangan ekonomi 2007, bagai-mana peran Amerika, Eropa, Jepang, China dan termasuk ma-salah seperti *global warming*, dan lain lain. "Mengenai bidang regional, isu yang dibahas antara lain integrasi keuangan di ka-wasan ini, masalah gerakan modal yang ada plus minusnya, ada masalah ada benefitnya, juga masalah China, mengenai peranan China dalam masalah pertumbuhan dan perkembangan ekono-mi di kawasan ini, maupun dikawasan global termasuk mengena-i masalah-masalah fleksibilitas, mengenai *exchange rate* atau sistem kurs itu pengaruhnya. Itu adalah poin-poin yang menjadi pembicaraan Presiden SBY dan De Rato," papar Boediono.



Hal menarik lainnya yang dibahas dalam pertemuan itu ialah mengenai permasalahan internal IMF sendiri. Berkaitan dengan hal itu pula Indonesia meminta untuk berperan lebih besar dalam menentukan skema ekonomi regional di Asia. SBY menyampaikan pandangan Indonesia yang menginginkan bahwa dalam kuota suara di IMF agar Indonesia bisa lebih besar lagi sehingga representasinya cukup signifikan, terutama perhatian ekonomi di wilayah Asia.

Kondisi IMF sendiri sekarang ini tengah dibelit masalah serius. Seperti yang dikatakan oleh juru bicara KAU (Koalisi Anti Utang), Kufsiardi. Hal itu disebabkan seperti memburuknya potensi pendapatan akibat percepatan pelunasan utang yang telah dilakukan beberapa negara seperti Indonesia, Serbia, dan Uruguay. Kufsiardi menambahkan, IMF juga menghadapi proyeksi kerugian operasional sebesar US\$87,5 juta dan US\$280 juta pada 2009. Di tahun fiskal 2007 yang akan berakhir pada 30 April 2007, IMF akan mengalami defisit sebesar US\$ 105 juta. Defisit tersebut telah melebihi dari proyeksi awal, yakni US\$ 90 juta

Dengan lunasnya utang Indonesia pada IMF sebesar US\$ 7,5 miliar, SBY menegaskan pula sejak 2007 ini Indonesia tak memerlukan forum CGI (Consultative Group on Indonesia).

Bedah Kejahatan Korporasi Dahaga di Atas Mata Air

*“ Used to be free
Now it cost you a fee
'cause it's all about
getting that cash money”*
– Mos Def, New World Water

Siapa yang tidak kenal dengan merk dagang **Aqua**? Sangking terkenalnya, nama Aqua kini telah menjadi semacam nama generik dari produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) serupa di Indonesia. Coba perhatikan sekitar kita, berapa banyak orang yang kita temui menyebut nama Aqua saat mereka hendak membeli AMDK di warung atau toko? Dan perhatikan juga, jarang sekali ada pembeli yang protes saat mereka diberi VIT, RON 88 atau ADES oleh si penjual walaupun sebelumnya mereka meminta *“Beli Aqua satu..”*

Hal itu mungkin sekali terjadi karena Aqua adalah pelopor bisnis AMDK dan menjadi produsen AMDK terbesar di Indonesia. Bahkan pangsa pasarnya sendiri saat ini sudah meliputi Singapura, Malaysia, Fiji, Australia, Timur Tengah dan Afrika. Di Indonesia sendiri mereka menguasai 80 persen penjualan AMDK dalam kemasan galon. Sedangkan untuk keseluruhan *market share* AMDK di Indonesia, Aqua menguasai 50% pasar. Saat ini Aqua memiliki 14 pabrik yang tersebar di Jawa dan Sumatra.

Produsen AMDK Aqua, PT. Golden Mississippi (kemudian bernama PT Aqua Golden Mississippi) yang bernaung di bawah PT. Tirta Investama (selanjutnya, dalam tulisan ini akan disebut sebagai Aqua saja, untuk mewakili korporasi produsen AMDK tersebut), didirikan pada 23 Februari 1973 oleh Tirtio Utomo (1930-1994). Pabrik pertamanya didirikan di Bekasi. Sejak saat itu, orang Indonesia mulai mengubah salah satu kebiasaannya secara mendasar dengan membiasakan diri mengonsumsi AMDK, membeli air.

Danone, sebuah korporasi multinasional asal Perancis, berambisi untuk memimpin pasar global lewat tiga bisnis intinya, yaitu: *dairy products*, AMDK dan biskuit. Untuk *dairy products*, kini Danone menempati posisi nomor satu di dunia dengan penguasaan pasar se-

Dalam pernyataannya pada wartawan, SBY ingin mengakhiri itu dan memulai babak baru dalam pembangunan Indonesia, yakni dengan merancang pembangunan dengan lebih bertanggung jawab. Kalaupun harus berhutang, SBY ingin itu dilakukan dalam konteks *G to G* (Government to Government) antar negara, bukan melalui forum semacam CGI atau IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia).

Hutang Indonesia Lainnya

Akan tetapi lunasnya hutang IMF bukan berarti Indonesia terbebas dari hutang yang sangat besar. Apalagi jika percaya dengan pernyataan SBY mengenai niatannya untuk memulai pembangunan tanpa mengandalkan hutang nampaknya merupakan suatu yang nihil untuk Indonesia. Minimal lima tahun ke depan Indonesia akan terus terbelit hutang. Menurut data Bappenas 2006, utang negara sudah mencapai US\$ 130 miliar, terdiri atas utang luar negeri US\$ 67,9 miliar dan utang domestik Rp.658 triliun. Setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri yang jatuh tempo Rp.96 triliun, ditambah beban utang dalam negeri Rp.60 triliun, sehingga setiap tahun Indonesia harus membayar utang Rp.150 triliun sampai dengan Rp. 170 triliun.

Dalam editorial Media Indonesia (1/2), memberitakan bahwa selepas pelunasan hutang pada IMF, beberapa departemen merencanakan hutang baru kepada kreditor luar negeri sebesar US\$ 40 miliar dalam tempo dua tahun ke depan sampai dengan 2009. Dari jumlah itu sebagian besar datang dari rencana Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Pinjaman US\$40 miliar dalam tempo dua tahun adalah angka yang fantastis. Ketika masih berada dalam formula CGI, kebutuhan pinjaman Indonesia sejak reformasi rata-rata US\$ 3 miliar. Artinya dalam tempo dua tahun CGI hanya mencurkan sekitar US\$ 6 miliar. Berbeda dengan data Bappenas, Media Indonesia menuliskan bahwa hutang luar negeri Indonesia telah mencapai US\$ 1000 triliun lebih. Dalam APBN 2007, alokasi dana yang harus dipakai untuk membayar hutang termasuk bunga tidak kurang dari Rp.200 triliun, atau sepertiga APBN yang Rp.600 triliun lebih itu.

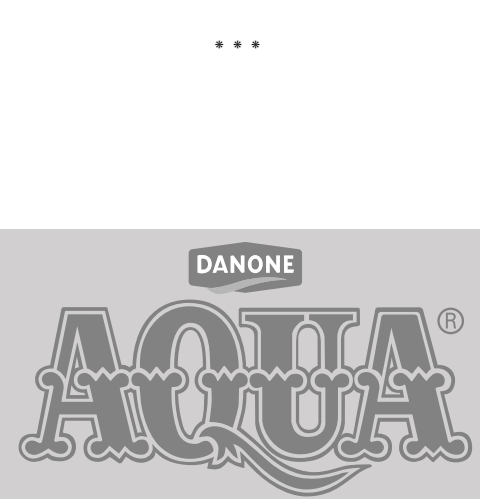
Salah satu lembaga keuangan internasional lainnya yang menjadi pemberi hutang terbesar pada Indonesia ialah ADB (Asian Development Bank) dan Indonesia tercatat selama 7 tahun terakhir ini Indonesia sebagai negara penghutang terbesarnya. Kurun waktu 1999-2005 saja hutang Indonesia pada ADB telah mencapai US\$ 20,7 miliar atau sekitar Rp. 186,3 triliun, dan belum termasuk bantuan teknis sebesar US\$.240,449 juta, dari jumlah itu utang yang belum dibayar sebesar US\$ 11 miliar atau sekitar Rp.99 triliun. Pada 2005, Indonesia pernah melunasi sebagian kecil pinjamannya, namun tahun itu pula Indonesia meminjam sekitar US\$ 1,15 miliar termasuk US\$ 350 juta pinjaman sektor swasta diluar jaminan pemerintah. Pinjaman 2005 itu ter-

masuk di dalamnya dengan biaya pembangunan kembali Aceh dan Nias sebesar US\$ 290 juta, dan belum termasuk US\$ 10 juta yang dipinjam untuk khusus mendanai perbaikan sarana air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman untuk pemerintah sendiri sebesar US\$ 300 juta, dan ADB melalui ADF (*Asian Development Fund*) ikut memberi pinjaman lagi sebesar US\$ 30 juta. Kemudian untuk pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya anggaran untuk desa dan wilayah tertinggal, ADB meminjamkan dana sebesar US\$ 250 juta.

Sebulan setelah pelunasan hutang IMF, November 2006 dalam pertemuan di Manila, ADB memutuskan akan memberi pinjaman kepada Indonesia sebesar US\$428 juta. Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang yang tercantum dalam rencana bantuan program untuk Indonesia di awal 2006 yang hanya sebesar US\$ 47,6 juta. Tahun 2006 bisa jadi Indonesia kembali memecahkan rekor negara pememinjam terbesar ADB, karena pada pertengahan Desember 2006, Indonesia telah meminjam sekitar US\$ 50 juta untuk perbaikan pendidikan di pesantren. Pinjaman ini adalah tahap awal dana yang dianggarkan oleh Departemen Agama dari jumlah keseluruhannya mencapai US\$ 71,4 juta yang akan dipe-nuhi sampai 2012.

Untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Indonesia memproyeksikan dana sebesar US\$ 65 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Dari jumlah tersebut, US\$ 25 miliar akan dibayar oleh pemerintah, US\$14 miliar oleh bank domestik, asuransi, dan lembaga keuangan domestik lainnya, US\$10 juta oleh rekanan pemerintah, dan US\$16 miliar oleh sektor swasta. Untuk awal 2007 saja pemerintah akan mendapatkan pinjaman hutang dari Bank Dunia sebesar US\$ 20 juta untuk perbaikan jalan nasional di daerah Pantura Jawa.

Dari jumlah hutang baru Indonesia yang sangat fantastis itu mengindikasikan bahwa pemerintah masih bernafsu untuk meminjam hutang dari luar, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ketika masih dalam formulasi CGI, penyaluran dana pinjaman diawasi secara ketat disertai audit keuangan nasional yang terbuka. Namun dengan pinjaman hutang baru ini pemerintah bisa jadi menghindar dari pengawasan ketat debitur. Hal ini pula menunjukkan bahwa lunasnya hutang IMF dan keluarnya Indonesia dari CGI, Pemerintahan SBY-JK tidak mengalami kemajuan apapun, selain hanya meningkatkan kepandaian mengalihkan hutang dari satu lembaga keuangan internasional ke lembaga keuangan internasional lainnya.



sebelumnya merupakan kawasan pertanian, kemudian oleh Aqua diubah menjadi kawasan seperti hutan yang tidak boleh digarap oleh warga setempat. Sekeliling kawasan mata air Kubang dipagari tembok oleh Aqua dan dijaga ketat oleh petugas keamanan sewaan selama 24 jam penuh setiap harinya. Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki kawasan tersebut dan bertepatan dengan pergantian milenium, pada tahun 2000 Aqua meluncurkan produk berlabel **Danone-Aqua**. Pada tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT. Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Grup Aqua.

Pada awalnya air yang dieksplotiasi oleh Aqua adalah air permukaan, yaitu air yang keluar secara langsung dari mata air tanpa dibor. Namun pada tahun 1994, Aqua mulai mengeks-ploitasi air bawah tanah dengan cara menggali jalur air dengan mesin bor bertekanan tinggi.

Sejak air di mata air Kubang disedot secara besar-besaran oleh Aqua, banyak perubahan yang dirasakan oleh warga sekitar. Yang paling terasa adalah menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di desa, dan ini berdampak buruk pada kehidupan warga desa itu sendiri. Penurunan daya dukung air ini tampak dari mulai munculnya masalah-masalah terkait dengan pemanfaatan sumber daya air di tingkat komunitas sejak sumber mata air Kubang dikuasai oleh Aqua. Salah satu masalahnya adalah kurangnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari termasuk air untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan lain-lain. Masalah ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan sumur-sumur milik warga yang menjadi sumber pemenuhan akan kebutuhan air bersih sehari-hari. Sekarang, tinggi muka air sumur milik kebanyakan warga maksimal hanya tinggal sejengkal saja atau sekitar 15

MONSTER IMF

(Bagian ke-2 dari “Trinitas-Suci”IMF, Bank Dunia dan WTO)

“Kini beberapa individu pialang saham memiliki uang sebanyak yang dimiliki beberapa negara kecil.”
—Judy Shelton, ahli sistem ekonomi moneter internasional, sebagaimana yang dikutip dalam *The New York Times*, 8 Mei 1994.



Latar Belakang

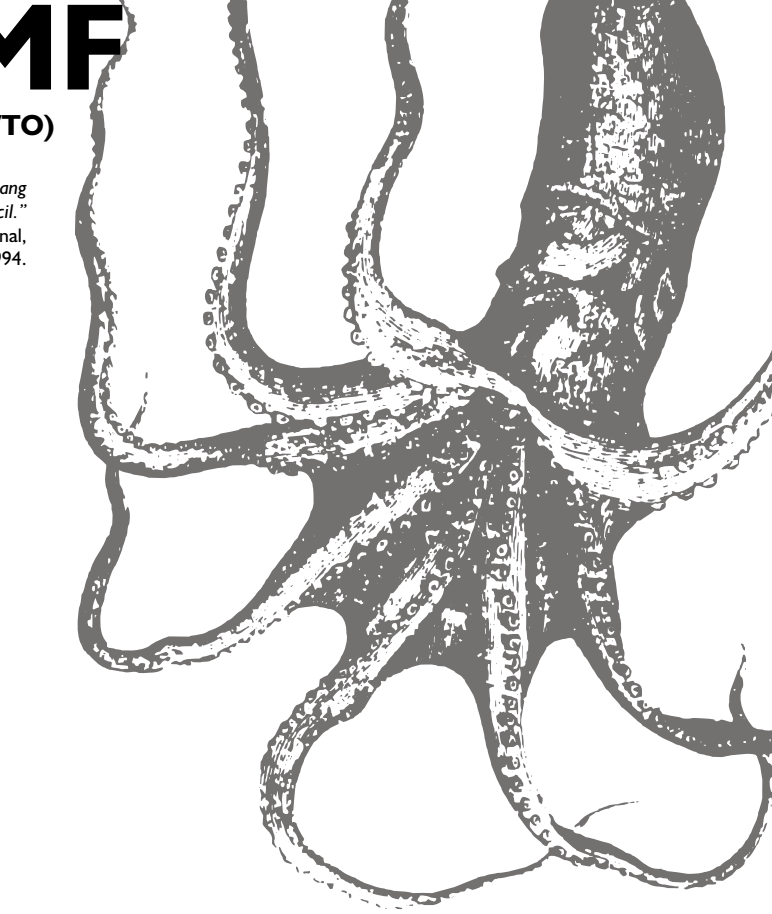
Secara umum telah diketahui bahwa ekonomi kapitalis ditandai dengan ketidakmampuannya yang kronis dalam melestarikan sumber daya manusia termasuk material bahan bakunya—yang termanifestasikan dalam keberadaan (serta peningkatan) kaum miskin, pengangguran, resesi dan depresi ekonomi. Sekali saja ekonomi berhenti berkembang, ia akan terjebak dalam jurang kemandegan yang berujung pada kolapsnya sistem secara keseluruhan. Untuk menghindari hal ini, berbagai kebijakan ekonomi diberlakukan dan diuji-cobakan. Krisis bank di abad ke-19 diatasi dengan di-kembangkannya bank sentral untuk mengontrol uang dan kredit. Sementara krisis terparah yang dikenal dengan “Depresi Besar” tahun 1930-an direspon dengan kebijakan Keynesian—yang diambil dari nama ekonom Inggris, John Maynard Keynes.

Keynes berargumen bahwa kurangnya perkembangan ekonomi adalah hasil dari ketimpangan ekonomi: pengangguran atau pekerja yang diupah rendah tidak mampu membeli kembali apa yang telah diproduksi. Kebijakan Keynesian menstimulasi tuntutan ekonomi dengan mendorong kenaikan upah, memperbesar kredit serta program-program kesejahteraan (seperti perhatian pada hak-hak buruh, standarisasi upah minimum, pensubsidian kebutuhan pokok, pembukaan lapangan kerja baru, pembangunan infrastruktur publik, dll.).

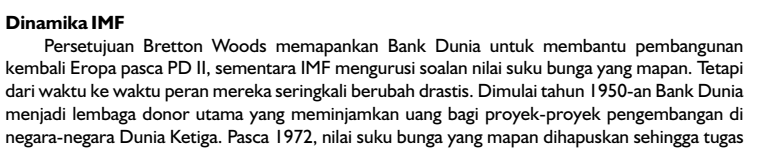
Tetapi pada kenyataannya, sistem ekonomi tersebut tidak mampu menanggulangi Depresi Besar tersebut semenjak ekonomi suatu negeri tak pernah dapat terlepas dari negeri lainnya, sehingga dibutuhkan sebuah “intervensi pemerintah” dalam skala besar—katakanlah Perang Dunia II. Hal ini mengarah pada ide untuk diberlakukannya kapitalisme yang diregulasi oleh negara-negara bangsa, sesuatu yang lantas dikenal dengan sistem: *regulated capitalism*. Ide ini hadir karena ada kecemasan bahwa pasar dunia yang tak diregulasi akan mengarah pada Depresi Besar lagi—sesuatu yang akan mengarah pada pemiskinan besar-besaran, radikalisme populer atau bahkan juga Perang Dunia.

Kapitalisme yang diregulasi ini memang tak menyentuh problem ‘abadi’ dari sistem kapitalisme sendiri—seperti distribusi kemakmuran yang tak merata, penghancuran alam, ketidak-pedulian pada kebutuhan dan tujuan non-pasar—tetapi ia setidaknya memperbaiki angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Atas kecemasan tersebutlah maka negara-negara kapitalis besar yang memberlakukan kapitalisme yang diregulasi ini pada tahun 1944 menginisiasikan pertemuan yang menghasilkan Persetujuan Bretton Wood, yang memapankan institusi-institusi untuk meregulasi ekonomi internasional. Persetujuan ini didasarkan pada hegemoni global Amerika Serikat (AS)—yang mana pada tahun 1950, AS telah menguasai 40% produksi dunia sekaligus kekuatan militer, politik dan bahkan juga “kebenaran”. Salah satu institusi yang dilahirkan tersebut salah satunya adalah IMF (*International*

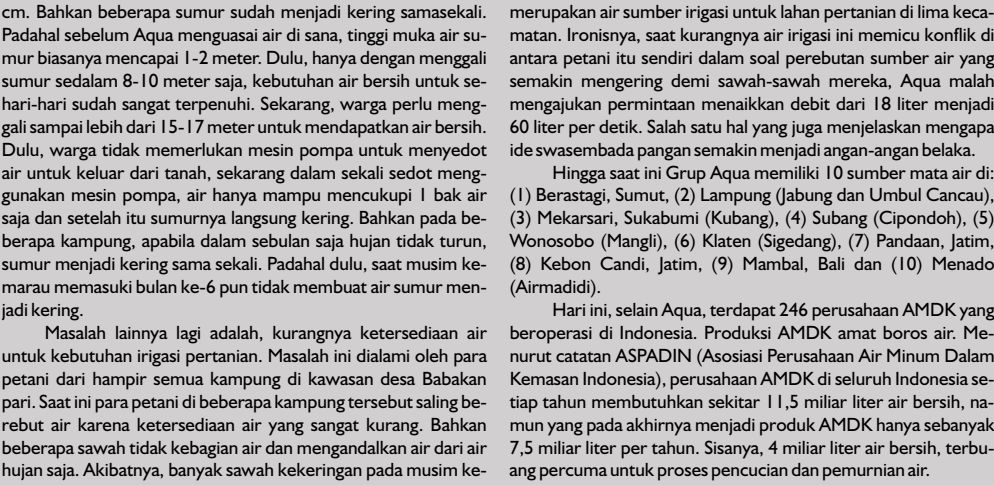


Monetary Fund)—di samping PBB, GATT (*General Agreement of Tariffs and Trade*, yang selanjutnya akan berevolusi menjadi WTO) dan Bank Dunia (*World Bank*).



Dinamika IMF

Persetujuan Bretton Woods memapankan Bank Dunia untuk membantu pembangunan kembali Eropa pasca PD II, sementara IMF mengurus soal nilai suku bunga yang mapan. Tetapi dari waktu ke waktu peran mereka seringkali berubah drastis. Dimulai tahun 1950-an Bank Dunia menjadi lembaga donor utama yang meminjamkan uang bagi proyek-proyek pengembangan di negara-negara Dunia Ketiga. Pasca 1972, nilai suku bunga yang mapan dihapuskan sehingga tugas



merupakan air sumber irigasi untuk lahan pertanian di lima kecamatan. Ironisnya, saat kurangnya air irigasi ini memicu konflik di antara petani itu sendiri dalam soal perebutan sumber air yang semakin mengering demi sawah-sawah mereka, Aqua malah mengajukan permintaan menaikkan debit dari 18 liter menjadi 60 liter per detik. Salah satu hal yang juga menjelaskan mengapa ide swasembada pangan semakin menjadi angan-angan belaka.

Hingga saat ini Grup Aqua memiliki 10 sumber mata air di: (1) Berastagi, Sumut, (2) Lampung (Jabung dan Umbul Cancau), (3) Mekarsari, Sukabumi (Kubang), (4) Subang (Cipondoh), (5) Wonosobo (Mangli), (6) Klaten (Sigedang), (7) Pandaan, Jatim, (8) Kebon Candi, Jatim, (9) Mambal, Bali dan (10) Menado (Airmadidi).

Hari ini, selain Aqua, terdapat 246 perusahaan AMDK yang beroperasi di Indonesia. Produksi AMDK amat boros air. Menurut catatan ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia), perusahaan AMDK di seluruh Indonesia setiap tahun membutuhkan sekitar 11,5 miliar liter air bersih, namun yang pada akhirnya menjadi produk AMDK hanya sebanyak 7,5 miliar liter per tahun. Sisanya, 4 miliar liter air bersih, terbuang percuma untuk proses pencucian dan pemurnian air.

Kejahatan yang Terlupakan di Balik Legalitas

Sama seperti sayur-sayuran, air yang merupakan sebuah produk alam, keluar dari muka bumi secara gratis dan tentu saja bukanlah “milik” siapapun. Sama seperti oksigen, seharusnya siapapun dapat mengakses air bersih. Apa yang terjadi di desa Babakan Pari dan Kabupaten Klaten tadi adalah contoh kecil bagaimana korporasi menguasai apa yang sudah seharusnya dapat diakses oleh semua orang, dan lalu menjualnya kembali kepada semua orang. Air bersih yang keluar dari muka bumi diklaim sebagai “milik” sebagian individu saja melalui jalur legal, disedot, dijual, dan dikemas oleh korporasi lalu ditenteng, diajakan, diperiklankan, dan dijualbelikan kepada semua orang—karena semua orang membutuhkan air bersih.

Menurut penelitian, ketersediaan air tawar saat ini kurang dari 1,5% dari seluruh air di muka bumi. Saban dua dasawarsa, kebutuhan umat manusia akan air tawar meningkat dua kali lipat. Angka itu dua kali lebih besar daripada tingkat pertumbuhan pen-

uduk. Apabila kecenderungan ini berlangsung terus, pada tahun 2025 permintaan akan air tawar diduga meningkat sebesar 56% melebihi yang tersedia saat ini. Kita dapat bayangkan sendiri apa yang akan terjadi apabila masa tersebut tiba sementara air bersih dikuasai oleh beberapa individu saja melalui korporasi-korporasinya.

Bagi sebagian orang, apa yang dilakukan oleh produsen AMDK seperti Aqua adalah sebuah bentuk “kejahatan legal”. Legal, karena hukum dan masyarakat mengakui bahwa Aqua “berhak” atas air yang keluar dari muka bumi secara gratis untuk menjadi “milik” mereka, karena mereka lalu memproduksinya secara “legal” serta memperjualbelikannya, dan semua itu dilakukan di bawah lindungan hukum. Artinya tidak melanggar hukum. Tentu saja.

Namun, legalitas dan hukum adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, dan selalu ada kepentingan tertentu di balik apapun yang diciptakan manusia. Hukum memang diciptakan untuk melindungi kepentingan mereka yang mampu menciptakan nya.

Dalam kebijakan neoliberalisme, pengambilalihan sumber daya air ini adalah hasil diterapkannya praktek privatisasi. Gagasan privatisasi terhadap sumber daya air ini diajukan terutama oleh Bank Dunia dan IMF, tentu saja dengan dukungan korporasi korporasi multinasional di baliknya. Privatisasi sumber daya air di banyak negara dilakukan untuk memenuhi persyaratan IMF dan Bank Dunia ketika memberikan pinjaman kepada negara tersebut (lihat artikel “Monster IMF” di jurnal ini).

Saat ini “hanya” air, tanah, api, dan udara yang bersih, suatu ketika mungkin akan sampai satu masa di mana bahkan sinar mataharipun menjadi barang dagangan dan tak tersisa sedikitpun hasil dari bumi ini yang bisa kita rasakan manfaatnya tanpa mengeluarkan uang. Masalahnya, tidak semua orang memiliki uang yang cukup, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Dan ini semua tampak tidak seperti sebuah kejahatan, karena hukum melindungi dan melegalisir semua hal tersebut.